

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era desentralisasi seperti sekarang ini, pemerintah pusat telah membuat kebijakan untuk membentuk daerah-daerah otonom yang diberi kewenangan untuk dapat mandiri dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dengan lebih baik. Dengan mandirinya suatu daerah diharapkan pelayanan publik yang diberikan akan lebih berkualitas sehingga kewajiban negara untuk melayani masyarakatnya secara baik dapat dipenuhi.

Dalam Pelayanan Publik terdapat klasifikasi, Menurut Mahmudi (dalam Darmawan 2006:200) pelayanan publik diklasifikasikan dalam dua kategori utama yaitu :

1. Pelayanan Kebutuhan Dasar

Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, meliputi :

- a) kesehatan
- b) Pendidikan dasar
- c) Bahan kebutuhan Pokok Masyarakat

2. Pelayanan Umum

Pelayanan Umum merupakan pelayanan pemerintah berkaitan dengan pelayanan administrasi dan barang untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

- a) Pelayanan Administrasi
(pembuatan KTP, sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, BPKB, STNK, IMB, PASpor)
- b) pelayanan barang
(jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih)
- c) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa meliputi pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana, pelayanan sosial.

Sampai saat ini pelayanan yang sering terabaikan adalah pelayanan layanan yang berifat sosial seperti layanan terhadap fakir miskin dan anak terlantar yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan publik terhadap mereka sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 34 yang berbunyi “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Salah satu pelayanan yang sampai saat ini masih terabaikan adalah pelayanan terhadap gelandangan. Permasalahan yang semakin kompleks dewasa ini ditandai munculnya kantong-kantong kemiskinan, konflik-konflik sosial, kesenjangan pemerataan pendapatan, tingginya angka pengangguran dan lain-lain. Jika ditinjau lagi, permasalahan gelandangan ini sebenarnya banyak menimbulkan dampak negatif. selain mengganggu keindahan kota, perilaku dari para gelandangan dan pengemis ini banyak merugikan masyarakat sekitar.

Dampak positif dan negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga selalu diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Gelandangan (gepeng) merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Keberhasilan percepatan pembangunan di wilayah perkotaan dan sebaliknya keterlambatan pembangunan di wilayah pedesaan mengundang arus migrasi desa-kota yang antara lain

memunculkan gepeng karena sulitnya pemukiman dan pekerjaan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Masalah umum gelandangan pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya gepeng maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan gepeng tersebut. Tampaknya gepeng tetap menjadi masalah dari tahun ke tahun, walaupun telah diusahakan penanggulangannya secara terpadu di wilayah penerima dan pengirim.

Penanganan masalah ini sebenarnya menunjukkan seberapa jauh kepedulian pemerintah khususnya pemerintah daerah terhadap masyarakat dan daerahnya. Penanganan terhadap masalah gelandangan saat ini bisa dikatakan masih sangat buruk. Pemerintah selalu melakukan upaya pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan dengan tujuan untuk memberikan kemampuan kepada gelandangan agar bisa memperoleh kehidupan yang layak, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 pasal 1 Th 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan PP Nomor 31 tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Akan tetapi pelayanan yang dilakukan masih belum memadai untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dari tahun ke tahun jumlah gelandangan di Kota Mojokerto terus meningkat:

Tabel 1

Jumlah Gelandangan Tahun 2008-2011

TAHUN	POPULASI GELANDANGAN
2008	59
2009	70
2010	80
2011	112

Sumber dari Dinas Sosial Kota Mojokerto

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa populasi gelandangan terus meningkat setiap tahunnya. hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan di Kota Mojokerto belum bisa menekan jumlah gelandangan yang digunakan sebagai indikator awal kesejahteraan gelandangan di Kota Mojokerto.

“Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP dan aparat Polresta Mojokerto, Senin (22/9/2011) menangkap 14 pengemis dan gelandangan yang terdiri atas 10 perempuan dewasa, satu laki-laki dewasa, dan tiga anak balita. Sebagian gelandangan yang ditangkap adalah orang-orang sama yang ditangkap pada sejumlah penertiban sebelumnya.” (Kompas, 30 April 2011)

Hal tersebut sangat ironi mengingat bahwa setiap tahun Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Sosial Kota Mojokerto sering kali memberikan pelayanan rehabilitasi kepada gelandangan ini, dengan tujuan untuk membina mereka agar bisa hidup dengan mandiri dan sejahtera, sehingga tidak lagi mengganggu ketertiban umum. Akan tetapi pelayanan rehabilitasi yang diberikan

Oleh Dinas Sosial terkesan masih sangat buruk seperti yang disampaikan oleh Anggota komisi Sunarto Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, pada sebuah wawancara di Radio Maja FM Senin (02/05/2012) mengatakan,

Kondisi Liposos di Balongrawe yang digunakan sebagai tempat Rehabilitasi bagi PMKS ini masih jauh dari layak untuk sebuah lingkungan rehabilitasi sosial. Selama ini tidak ada pos anggaran APBD yang khusus untuk Liposos. Pemkot hanya menyalurkan bantuan bagi penghuni yang terkategori penyandang masalah kerawanan sosial PMKS.

Masalah kesejahteraan sosial tidak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan dan pembangunan negara, melalui Undang-Undang dasar 1945 mengamanatkan akan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan kesejahteraan sosial juga menjadi tanggung jawab daerah termasuk didalamnya pemerintah Kota Mojokerto sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang juga mengalami permasalahan dalam menangani gelandangan ini. Data dari dinas sosial Kota Mojokerto menunjukkan peningkatan jumlah gelandangan. Oleh karena itu peneliti menulis judul tentang “Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Gelandangan”
(Suatu Studi Tentang Rehabilitasi Gelandangan Di Kota.Mojokerto)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Mojokerto terkait dengan rehabilitasi terhadap Gelandangan di Kota Mojokerto?

2. Apakah Faktor penghambat dalam pemberian pelayanan rehabilitasi gelandangan di Kota Mojokerto?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Mojokerto terkait dengan Rehabilitasi terhadap gelandangan di Kota. Mojokerto.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor penghambat dalam pemberian pelayanan rehabilitasi gelandangan di Kota Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Secara teoritis, output dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota. Mojokerto sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelayanan publik terhadap masyarakatnya, lebih khususnya dalam rehabilitasi gelandangan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan akan ditemukan suatu konsep baru dalam memberikan pelayanan rehabilitasi yang lebih baik pada gelandangan melalui peran serta dan keterlibatan berbagai pihak dalam pemerintahan.

Secara praktis, output penelitian ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan dilapangan. Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa informasi mengenai bagaimana pelayanan rehabilitasi yang diberikan oleh

pemerintah Kota. Mojokerto selama ini. Informasi tersebut dapat dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pelayanan yang selanjutnya akan dapat diambil langkah yang tepat untuk mengatasi kekurangan yang ada.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, sistematika pembahasan, dan kerangka pemikiran.

Bab 2 KAJIAN PUSTAKA, memberikan uraian mengenai desentralisasi dan pemerintah daerah, Pergeseran paradigma pelayanan publik, konsep pelayanan publik, gelandangan dan rehabilitasi sosial.

Bab 3 METODE PENELITIAN, menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan dan memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data dan jenis, teknik pengumpulan data, instrumen data dan metode analisis.

Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang hasil dan pembahasan dari penelitian meliputi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota Mojokerto terkait dengan rehabilitasi terhadap gelandangan di kota Mojokerto. kerjasama kelembagaan yang terjalin antara pemerintah Kab. Mojokerto dengan dinas-dinas dan lembaga-lembaga terkait dalam rehabilitasi gelandangan di Kab. Mojokerto. Serta menemukan hambatan atau kendala yang dialami pemerintah Kab. Mojokerto dalam memberikan pelayanan rehabilitasi terhadap gelandangan, sehingga dapat diperoleh rancangan pelayanan publik yang

lebih baik bagi gelandangan berdasarkan pengelolaan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab 5 PENUTUP, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.

